



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapin sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam beberapa kelompok prioritas.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas program (*money follow program*). Untuk itu ditetapkan proyeksi alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut prioritas, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut kelompok prioritas Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 3.18. Hasil proyeksi lima tahun kedepan menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan untuk belanja langsung sebesar 5,00 persen.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.18
Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Uraian	Proyeksi				
	2019	2020	2021	2022	2023
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	724.124.744.317	760.805.977.607	796.086.156.203	835.011.386.420	878.535.594.874
BELANJA LANGSUNG	724.124.744.317	760.805.977.607	796.086.156.203	835.011.386.420	878.535.594.874
- PRIORITAS I	59,942,403,697	62,978,843,636	65,899,305,510	69,121,501,522	72,724,396,872
- PRIORITAS II	490,592,717,365	525,213,776,884	524,854,979,026	561,913,828,160	585,900,607,440
- PRIORITAS III	173,589,623,255	172,613,357,087	205,331,871,667	203,976,056,738	219,910,590,562

Sumber: Hasil pengolahan data



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, maka dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Masalah pokok pembangunan di Kabupaten Tapin dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pengembangan Perekonomian.
3. Infrastruktur yang belum memadai.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum optimal.

Uraian lebih rinci atas masalah pokok di Kabupaten Tapin akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

4.1.1. Sumber Daya Manusia yang masih rendah

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data, pencapaian IPM Kabupaten Tapin masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin. Target IPM ditetapkan sebesar 77 pada tahap III RPJPD tahun 2015-2019. Adapun pencapaian IPM tahun 2017 sebesar 68,70, yang berarti masih di bawah target tahap III RPJPD tahun 2015-2019.

Beberapa masalah terkait masalah pokok masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Tapin, antara lain:



1. Angka harapan lama sekolah yang masih rendah, yaitu: 11,52. Angka harapan lama sekolah masih berada di bawah angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,46.
2. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2013-2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,48 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 6,84. Data tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,99 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,53.
3. APM SLTA/MA/SMK Kabupaten Tapin tahun 2017 masih rendah di angka 48,31%.
4. Rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih berfluktuasi.
5. Angka kelangsungan hidup bayi masih berfluktuasi naik dan turun. AKB tertinggi sebesar 23 di tahun 2014, dan AKB terendah sebesar 17 di tahun 2016.
6. Jumlah puskesmas dan pustu yang tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2012-2016. puskesmas sebanyak 13 puskesmas dan jumlah pustu sebanyak 37 pustu.
7. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami penurunan dari 0,128 tahun 2014 menjadi 0,114 tahun 2016.

4.1.2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pengembangan Perekonomian

Kondisi perekonomian di Kabupaten Tapin 5 (lima) tahun terakhir khususnya periode 2013-2015 mengalami pelambatan, dimana laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend penurunan. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 sebesar 6,32 persen mengalami penurunan sampai pada 4,05 persen pada Tahun 2015. Namun kondisi mulai membaik dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 mencapai 4,85 persen.

Bila ditinjau dari penyumbang PDRB, maka perekonomian di Kabupaten Tapin masih bertumpu pada sektor pertambangan dan sektor



pertanian. Pada tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tapin sebesar 27,77 persen. Lalu pada urutan berikutnya terdapat sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 21,71 persen. Perekonomian Kabupaten Tapin akan sangat rentan jika terjadi gejolak harga komoditas pertanian dan komoditas pertambangan.

Beberapa masalah penyebab masalah pokok belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan perekonomian, diidentifikasi sebagai berikut:

1. PDRB ADHB yang belum mencapai target RPJPD

Target Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) untuk tahap III RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2015-2019 ditetapkan sebesar 7.549.606 juta rupiah. Adapun pencapaian PDRB ADHB sampai tahun 2016 sebesar 6,900,018.89 juta rupiah yang masih di bawah target tahap III RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2015-2019.

2. Masih tingginya dominasi sektor pertanian yang belum diikuti oleh sektor perdagangan dan industri untuk peningkatan nilai tambah pertanian

Pada dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025, dinyatakan bahwa kontribusi sektor pertanian PDRB ADHB ditargetkan di bawah 10,55 persen untuk tahap III RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2015-2019. Sementara berdasarkan data dari BPS, kontribusi sektor pertanian PDRB ADHB pada Tahun 2016 sebesar 21,71 persen. Ketergantungan Kabupaten Tapin atas sektor pertanian masih belum bisa diubah.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tapin masih berada di bawah target tahap III RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2015-2019 yang ditetapkan sebesar 12,99 persen. Pada tahun 2016 tercatat kontribusi sektor industri pengolahan hanya sebesar 6,99 persen. Sementara itu, sektor perdagangan menyumbang sebanyak 9,56 persen terhadap PDRB pada tahun 2016.

Diharapkan kedua sektor tersebut dapat lebih berkembang pada tahun-tahun yang akan datang agar dapat mengolah dan



memperdagangkan hasil olahan dari produk pertanian baik dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi. Dengan demikian, diharapkan produk pertanian memiliki nilai tambah yang semakin besar.

3. Masih tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan

Sebagaimana diketahui, sektor pertambangan di Kabupaten Tapin masih menjadi primadona. Tercatat sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB selama beberapa tahun terakhir adalah sektor perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tapin sebesar 27,77 persen pada Tahun 2016. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan ini berangsur-angsur harus dikurangi dan mulai beralih ke sektor lain yang lebih ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang digagas Pemerintah Indonesia perlu menjadi perhatian dan untuk itu upaya pengembangan perekonomian Tapin perlu diarahkan untuk mendorong sektor lain yang hanya bertumpu pada kekayaan alam tak terbarukan.

Upaya untuk mengurangi ketergantungan ini telah dilakukan, yang dibuktikan dengan adanya penurunan kontribusi sektor pertambangan. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tertinggi sebesar 36,16 persen di tahun 2013 mengalami penurunan sehingga mencapai 27,77 persen di tahun 2016.

4.1.3. Infrastruktur yang belum memadai

Infrastruktur yang terdiri dari: jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih merupakan hal yang mendasar untuk mendukung kehidupan dan kegiatan di Kabupaten Tapin. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah serta aktifitas lainnya.

Beberapa masalah penyebab dari masalah pokok infrastruktur yang belum memadai, antara lain:

1. Persentase jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 60,25 persen tahun 2013 menjadi 44,47 persen tahun 2016. Penurunan ini perlu segera mendapatkan solusi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan buruknya kondisi jalan, maka



- akan mempengaruhi kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
2. Persentase irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 82,63 persen tahun 2013 menjadi 65 persen tahun 2016. Penurunan ini sangat mempengaruhi produksi pertanian khususnya sawah. Petani di Tapin pada umumnya masih mengusahakan pertanian dalam bentuk tradisional. Indeks pertanaman saat ini baru mencapai 2x setahun, sebab keterbatasan pengairan dari irigasi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan layanan irigasi untuk mendukung pertanian.
 3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2015 belum optimal yaitu 55,48 persen. Ini berarti hamper setengah (44,52 persen) penduduk Tapin belum mendapatkan pelayanan air bersih.

4.1.4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan visi dan misi pembangunan.

Beberapa masalah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pemda yang dicerminkan dari indikator Nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kabupaten Tapin mendapatkan peningkatan menjadi nilai CC di tahun 2015 dan tahun berikutnya masih pada



- angka yang sama. Ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, namun belum optimal. Nilai CC tersebut berarti masih banyak aspek yang perlu dibenahi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Tapin dapat memberikan kinerja yang terbaik dan akuntabel.
2. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) belum optimal. Walaupun kualitas LPPD Kabupaten Tapin semakin membaik, namun masih berada pada peringkat 127 pada Tahun 2015. Posisi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2013 yang berada di peringkat 135.
 3. Pelayanan publik kepada masyarakat belum optimal. Salah satu indikator yang umum dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan posisi terakhir pada tahun 2016 mencapai 75. Prestasi ini tentu masih sangat perlu ditingkatkan untuk lebih memberikan pelayanan publik yang baik.

Penyajian masalah pokok dan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu dilengkapi dengan akar masalah. Akar masalah memberikan gambaran penyebab dari timbulnya masalah pembangunan. Hal ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Pembangunan di Kabupaten Tapin

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah	Pendidikan: 1. Angka harapan lama sekolah yang masih rendah. 2. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2013-2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.	1. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, keahlian, kompetensi, kualifikasi dan sebaran geografis sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Dasar (SD/SMP/Sederajat), dan



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<ol style="list-style-type: none"> 3. APM SLTA/MA/SMK Kabupaten Tapin tahun 2017 masih rendah. 4. Rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih berfluktuasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Sederajat 2. Belum meratanya kapasitas pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang dimiliki aparat pengelola perencanaan, pelaksana, serta pengendali program dan kegiatan bidang pendidikan 3. Kualifikasi tenaga kependidikan masih ada yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu 4. Sarana dan prasarana pendidikan terbatas 5. Kurang maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar
		<p>Kesehatan:</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kelangsungan hidup bayi masih berfluktuasi. 2. Jumlah puskesmas dan pustu yang tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2012-2016. 3. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami penurunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran SDM kesehatan 2. Belum optimalnya ketersediaan alat kesehatan yang memadai di sarana fasilitas kesehatan 3. Belum optimalnya promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan 5. Terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 6. Belum terpenuhinya jumlah tempat tidur ideal di RSUD Datu Sanggul, sarana prasarana kurang dan perlu penambahan/perluasan gedung RSUD Datu Sanggul
2	<p>Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan perekonomian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB ADHB yang belum mencapai target RPJPD 2. Masih tingginya dominasi sektor pertanian yang belum diikuti oleh sektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postur ekonomi Kabupaten Tapin masih didominasi oleh sektor primer (pertambangan, pertanian). 2. Belum berkembangnya sektor lain diluar

4



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>perdagangan dan industri untuk peningkatan nilai tambah pertanian</p> <p>3. Masih tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan</p>	<p>pertambangan dan pertanian.</p> <p>3. SDM Kabupaten Tapin belum mendukung untuk diluar sektor pertanian.</p> <p>4. Masih pada taraf produksi langsung jual, belum ada pengolahan. Industri pengolahan hasil pertanian lebih lanjut belum berkembang.</p> <p>5. Sarana dan prasarana belum mendukung.</p>
3	Infrastruktur yang belum memadai	<p>1. Persentase jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan</p> <p>2. Persentase irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan</p> <p>3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2015 belum optimal</p>	<p>1. Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur</p> <p>2. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas bangunan infrastruktur</p> <p>3. Belum optimalnya pengetahuan aparatur dalam menyusun dan melaksanakan rencana dengan baik.</p> <p>4. Terbatasnya personil yang berkualitas yang menguasai bidang pekerjaan yang ditangani.</p>
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum optimal	<p>1. Belum optimalnya kinerja pemda yang dicerminkan dari indicator Nilai SAKIP</p> <p>2. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) belum optimal</p> <p>3. Pelayanan publik belum optimal</p>	<p>1. Perangkat daerah masih belum mampu melaporkan hasil evaluasi capaian pembangunan secara benar dan baik.</p> <p>2. Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor. Hal ini terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah kepada penerapan konsep "One-Stop Service" karena memang dalam pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-belit dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap</p>

Sumber: hasil analisis



4.2. Isu Strategis

4.2.1 Penelaahan Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Tapin. Hasil *review* akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Tapin.

a. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

1) Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari atas lima elemen inti: (i) arus barang yang bebas; (ii) arus jasa yang bebas; (iii) arus investasi yang bebas; (iv) arus modal yang lebih bebas; dan (v) arus tenaga kerja terampil yang bebas. Komponen dalam pasar tunggal dan basis produksi adalah termasuk 12 (dua belas) sektor-sektor prioritas. Adapun 12 sektor-sektor prioritas yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa.

**Tabel 4.2 Sektor Prioritas MEA**

NO	SEKTOR BARANG INDUSTRI	NO	SEKTOR JASA
1	produk berbasis pertanian	1	transportasi udara
2	Elektronik	2	e-asean
3	Perikanan	3	pelayanan kesehatan
4	produk berbasis karet	4	Turisme
5	Tekstil	5	jasa logistic
6	otomotif,		
7	produk berbasis kayu		

2) Kawasan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi

Perwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi merupakan tujuan dari integrasi ekonomi ASEAN. Terdapat enam elemen inti bagi kawasan ekonomi yang berdaya saing ini, yaitu: (i) kebijakan persaingan; (ii) perlindungan konsumen; (ii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (iv) pembangunan infrastruktur; (v) perpajakan; (vi) *ecommerce*.

Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha secara nasional untuk menjamin tingkat kesetaraan dan menciptakan budaya persaingan usaha yang sehat untuk meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang.

3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Yang Merata

Hal ini meliputi: (i) Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan (ii) Inisiatif untuk Integrasi ASEAN. Kedua inisiatif ini diarahkan untuk menjembatani jurang pembangunan baik pada tingkat UKM maupun untuk memperkuat integrasi ekonomi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam agar semua anggotadapat bergerak maju secara serempak dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai kawasan yang memberikan manfaat dari proses integrasi kepada semua anggotanya.



4) Kawasan Yang Secara Penuh Terintegrasi ke dalam Perekonomian Global

ASEAN bergerak di sebuah lingkungan yang makin terhubung dalam jejaring global yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri yang mendunia. Agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global, untuk menjadikan ASEAN lebih dinamis sebagai *mainstream* pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwa pasar domestik tetap menarik bagi investasi asing, maka ASEAN harus lebih menjangkau melampaui batas-batas MEA.

Dua pendekatan yang ditempuh ASEAN dalam berpartisipasi dalam proses integrasi dengan perekonomian dunia adalah: (i) pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternal melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Area/FTA*) dan kemitraan ekonomi yang lebih erat (*Closer Economic Partnership/CEP*), dan (ii) partisipasi yang lebih kuat dalam jejaring pasokan global.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan ditelaah adalah periode 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:



1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

d. Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, terdapat satu proyek strategis nasional di Kabupaten Tapin, yaitu proyek Bendungan Tapin. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin.



e. Penelaahan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Tema rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, yaitu:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”

Pembangunan periode 2020-2024 diarahkan pada beberapa fokus dalam rangka menjawab isu-isu strategis. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024, meliputi:

1. Arah Kebijakan Pembangunan manusia, dengan fokus: a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial, dan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi, dengan fokus: Pangan dan Pertanian; Energi, Mineral, dan Pertambangan; Kelautan dan Kemaritiman; Pariwisata; Ekonomi Kreatif dan Digital; dan Industri Manufaktur.
3. Arah Kebijakan Pembangunan infrastruktur
4. Arah Kebijakan Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
5. Arah Kebijakan Pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah yang direncanakan oleh Bappenas untuk Pulau Kalimantan, dijelaskan sebagai berikut:

Tema Pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu: Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, kehutanan, dan lumbung energi nasional.

Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:

- a. Operasionalisasi KEK MBTK, KI Landak, Batulicin dan Jorong.
- b. Peningkatan investasi di KI Ketapang.
- c. Pengembangan kawasan metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin dan sekitarnya).
- d. Pengembangan jalur kereta api Kalimantan.

Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024 yaitu:

- a. Industri Manufaktur

4



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

- Sub sektor industri batu bara dan pengilangan migas
- Sub sektor industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain-lain
- b. Pertanian, kehutanan, perikanan
 - Sub sub sektor tanaman perkebunan
- c. Pertambangan dan Penggalian
 - Sub sektor pertambangan batu bara
- d. Transportasi dan pergudangan
 - Sub sektor angkutan sungai, danau, dan penyebrangan

Perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk Pulau Kalimantan adalah 2020: 4,6% dan 2024: 5,2%. Target ini akan menjadi pertimbangan untuk penentuan target pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan, termasuk Kabupaten Tapin.

Rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 juga menyajikan proyeksi target indikatif pembangunan pada periode berkenaan. Beberapa indikator kinerja makro diproyeksikan sampai 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Proyeksi Target Indikatif Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	Pengangguran	Ketimpangan
Kondisi Saat Ini (2018)	5,27%*	9,82%	5,13%	0,389
Sasaran dalam RKP 2019	5,2-5,6%	8,5-9,5%	4,8-5,2%	0,38-0,39
Sasaran dalam RPJPN 2005-2025	4,5-5,5%**	≤5%	≤5%	0,36
Proyeksi Baseline SDGs 2024	4,2 %***	8,21%	5,02%	0,387
Sasaran Dalam RPJMN 2020-2024****	5,7%	5,0-5,7%	4,0-4,6%	0,371-0,373

Sumber: Bappenas, 2018

Keterangan:

*) Kuartal II 2018

**) Tertulis: setara negara berpendapatan menengah

***) Laju pertumbuhan PDB per kapita

****) Skenario moderat

Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 disajikan secara komprehensif pada gambar berikut ini.

2



Gambar 4.1 Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

4



f. Penelaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2016 – 2021 yaitu: **“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”**.

Visi “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing” tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil). Kondisi Pembangunan yang mapan di suatu daerah/wilayah, adalah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan untuk generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. dengan demikian pembangunan yang mapan terkait dengan penekanan pada daya tampung dan daya dukung. Dengan demikian definisi di atas dapat dilihat dari faktor lingkungan, masa depan dan keadilan, sedangkan aspek-aspek keamanan tersebut dapat dilihat dari segi: Keamanan Ekonomi, keamanan Ekologi, Keamanan Sosial, Keamanan Budaya, Keamanan Pertanian, Keamanan dalam berpolitik, Keamanan dalam kehidupan beragama, dan sebagainya. Diharapkan Kemandirian dan keterdepanan dimaksud, akhirnya akan berdampak terhadap perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian **“Pembangunan Biru (*blue development*) Menuju Kedaulatan dan Keamanan Berkelanjutan”**, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Biru (*blue development*) adalah pembangunan yang memperhatikan keberadaan sumberdaya, mempertahankan keragaman (*biodiversity*), inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasa-jasa lingkungan.
2. Ekonomi biru (*blue economy*) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu



- menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.
3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; yaitu Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan (*social equity*) dan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainability*) yang dikenal dengan *the living triangle*.
 4. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi diatas, ditetapkan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan. Agar Pembangunan Kalimantan Selatan dalam 5 tahun kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan, yaitu:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1. Kalsel Cerdas
2. Kalsel Sehat
3. Kalsel Terampil
4. Kalsel Beriman
5. Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik
6. Kalsel Berbudaya
7. Kalsel Aman
8. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON
9. Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas
10. Kalsel Sentra Pangan
11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa
13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas

4.2.2 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Di dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota. Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Tapin.

Tabel 4.4 Telaahan RPJMD Daerah Sekitar Tapin

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT
1	Kabupaten Barito Kuala	2017-2022	RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 masih dalam proses penetapan.
2	Kabupaten Banjar	2016-2021	Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera Dan Barokah Misi: 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT
			dengan pendekatan bisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan 4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2014-2018	Visi: Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif (SEHATI)
			Misi: 1. Meningkatkan Kehidupan Beragama. 2. Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah. 3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah. 4. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika.

Sumber:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapin

a. RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025. Di dalam dokumen ini mengatur tentang rencana pembangunan selama 20 tahun dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 merupakan tahapan ketiga (2015-2019) dan keempat (2020-2025) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Bab III RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025, isu strategis yang perlu diatasi secara bertahap dan berkesinambungan dalam 20 tahun mendatang di Kabupaten Tapin, yaitu:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1. Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana;
2. Kelestarian sumber daya Alam dan lingkungan hidup;
3. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. Optimalisasi pengembangan sektor industri unggulan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
5. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
6. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan;
7. Kualitas pembangunan manusia dilihat dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli;
8. Besarnya aspirasi pengalaman nilai dan norma agama dalam berbagai dimensi kehidupan pada tatanan sosial;
9. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah;
10. Kualitas kehidupan berdemokrasi dan berpolitik;
11. Peran serta pemerintah dan masyarakat terhadap penanganan masalah sosial;
12. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah;
13. Kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pengairan dan sumberdaya air;
14. Kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
15. Kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
16. Kualitas pelayanan publik;
17. Optimalisasi pendelegasian kewenangan ke Kecamatan; dan
18. Penguatan otonomi desa dan keberdayaan tatanan masyarakat.

Visi Kabupaten Tapin 2005-2025, yaitu: **Tapin Yang Religius dan Sejahtera.**

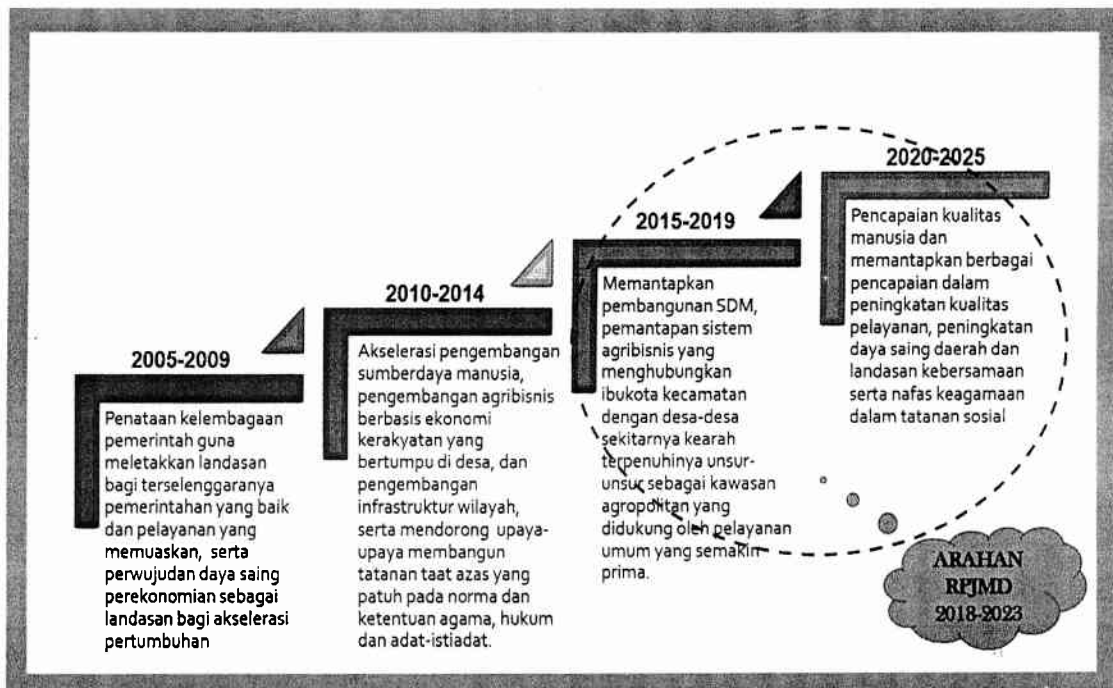
Dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya



- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing
- 3) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan
- 4) Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan
- 5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)

Perwujudan visi dan misi jangka panjang pembangunan daerah ditempuh dengan arah kebijakan pembangunan yang fokus per tahapan. Berikut ini disajikan arah kebijakan per periode/tahapan Kabupaten Tapin.



Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025



Tabel 4.5 Arah Kebijakan Tahap Ketiga dan Keempat RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025

MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
1. Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya	<p>Peningkatan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya:</p> <p>a. Peningkatan peran multipihak dalam pemenuhan kebutuhan sarana peribadahan</p> <p>b. Pendidikan agama mulai dari pembelajaran alquran anak usia dini hingga majelis ta'lim dan pengajian</p> <p>c. Pemeliharaan dan peningkatan toleransi kehidupan beragama</p> <p>d. Penyadaran serta keteladanan etika kerja, etika bisnis dan etika sosial yang berlandaskan pada kebijakan yang bersumber dari pemahaman dan pengamalan ajaran agama</p>	<p>Pada periode ini, momentum perubahan yang telah diakselerasi pada periode kedua dimanfaatkan untuk memantapkan pencapaian dalam kualitas manusia, namun prioritas-prioritas baru dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah serta landasan kebersamaan dan nafas keagamaan juga ditangani sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis. Fokus pembangunan pada tahap ini adalah memantapkan pembangunan SDM menjadi peningkatan kualitas manusia, dimana hasil dari pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak hanya diarahkan bagi lahirnya SDM berkualitas guna mendukung kemajuan daerah, tetapi mulai bergeser pada makna lahirnya manusia berkualitas yang memiliki pilihan luas dalam kehidupannya. Peningkatan kualitas manusia pada periode ini diharapkan berjalan seiring dengan praktek demokrasi yang semakin substantif. Fokus lainnya adalah pemantapan sistem agribisnis</p>	<p>Periode ini merupakan momentum untuk pencapaian kualitas manusia dan memantapkan berbagai pencapaian dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah dan landasan kebersamaan serta nafas keagamaan dalam tatanan sosial. Periode ini juga merupakan peletakan dasar sekaligus transisi untuk memasuki periode pembangunan jangka panjang berikutnya.</p> <p>Pada periode ini peningkatan kualitas manusia yang telah dicapai melalui tiga periode RPJM Daerah sebelumnya diorientasikan untuk terciptanya tatanan yang membuka ruang bagi warganya untuk mengembangkan pilihan-pilihan dalam kehidupannya serta menyuarakan secara demokratis pilihan-pilihan tersebut. Artinya, kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat telah mengalami akselerasi untuk</p>
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing	<p>Peningkatan Sumber Daya Tapin yang Berdaya Saing:</p> <p>a. Pembangunan pendidikan diarahkan pada (1) menurunnya angka buta huruf secara signifikan, (2) meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia SD, SLTP dan SLTA, (3) meningkatnya kecakapan hidup remaja/pemuda putus sekolah, (4) meningkatnya kualitas guru, sarana-prasarana dan proses belajar-mengajar SD, SLTP dan SLTA; melalui (1) percepatan penghapusan buta huruf, (2) penuntasan wajib belajar bagi seluruh anak usia wajib belajar 12 tahun dan pencegahan putus sekolah, (3) pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat untuk kecakapan hidup (life</p>		



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>skills) dan kewirausahaan inovatif pemuda putus sekolah, dan (4) peningkatan kualitas guru, peningkatan kecukupan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas proses belajar-mengajar, dan peningkatan pencapaian nilai dan kelulusan ujian nasional pada tingkat SD, SLTP dan SLTA, dengan prioritas pada wilayah dengan angka buta huruf dan putus sekolah yang tinggi, serta mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.</p> <p>b. Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana diarahkan pada (1) termanifestasikannya pola hidup, lingkungan hidup dan perilaku hidup sehat masyarakat dengan mengutamakan pencegahan dari pengobatan, (2) meningkatnya efektivitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit, (3) menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan, (4) terkendalikannya pertumbuhan penduduk, (5) terpenuhinya kebutuhan peralatan, teknologi, obat-obatan, dokter dan paramedis, (6) meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, flu-burung dan sejenisnya serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global; melalui (1) promosi hidup sehat, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan perbaikan gizi</p>	<p>yang menghubungkan perkembangan ibukota kecamatan dengan desa-desa sekitarnya kearah terpenuhinya unsur-unsur sebagai kawasan agropolitan. Interkoneksi antara kegiatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan pada desa-desa dengan ibukota kecamatan sebagai terminal pemasaran hasil agribisnis dan pusat fasilitas serta sarana produksi bagi agribisnis, dan dimantapkan melalui dukungan infrastruktur wilayah dalam hal transportasi, komunikasi dan informasi, ketersediaan listrik dan air bersih serta mendorong kemajuan dalam inovasi teknologi baik budidaya maupun pengolahan hasil. Pada tahapan ini pula terbangun dan terpeliharanya kawasan rantau baru, terbangunnya kawasan margasari baru dan proses pengembangan pembangunan binuang baru sebagai kawasan penting yang tentunya akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tapin. Pencapaian kualitas manusia pada tahap ini direncanakan mencapai nilai IPM sekitar 77</p>	<p>pemanusiaan manusia itu sendiri, bukan hanya sekedar melahirkannya sebagai sumberdaya handal untuk perekonomian, perpolitikan atau sosial budaya, tetapi untuk kemanusiaan itu sendiri. Pada periode 2020-2025 ini, tatanan dengan manusia berkualitas secara individual, diharapkan didukung penuh oleh landasan kebersamaan dan nafas keagamaan pada tingkat struktur sosial, sehingga kesejahteraan mewujudkan sebagai bagian dari kemanusiaan dan dalam tatanan sosial yang baik. Program pembangunan dalam perekonomian yang sebelumnya difokuskan pada akselerasi agribisnis, pada periode ini difokuskan pada terbentuknya kawasan agropolitan. Program diarahkan untuk mensinergikan desa-desa agribisnis dengan ibukota kecamatan sehingga interkoneksi keduanya melahirkan kawasan agropolitan. Karakteristik program pada periode ini adalah pengkondisian</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>khususnya pada masyarakat miskin, wilayah pegunungan dan wilayah kumuh, (2) peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan gratis/ jaminan kesehatan masyarakat dengan prioritas pada keluarga miskin disertai peningkatan kemampuan pelayanan dari institusi kesehatan beserta jaringannya, (3) peningkatan efektivitas peran sarana pelayanan kesehatan serta pemberdayaan posyandu dalam penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, serta pemantauan pertumbuhan balita, (4) revitalisasi gerakan keluarga berencana dan pelebagaan norma keluarga kecil dan sejahtera, (5) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan, (6) pengembangan sistem antisipasi penyakit spesifik dan dampak kesehatan dari pemanasan global sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Tapin.</p> <p>c. Penguatan daya beli masyarakat diarahkan untuk tersedianya alternatif pilihan masyarakat dalam mengakses barang/komoditas yang menjadi kebutuhan pokok dengan pendapatan yang layak dan harga yang terjangkau; melalui upaya penciptaan kondisi bagi meningkatnya pendapatan masyarakat, regulasi yang menjamin suplai barang/komoditas kebutuhan pokok masyarakat, intervensi pasar atas komoditas yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, serta pengaturan yang ketat bagi berjalannya etika bisnis</p>	<p>dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan sedangkan untuk dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 68 tahun dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan Pada periode ini kontribusi sektor primer pertanian terhadap struktur perkonomian diproyeksikan dibawah 10,55 persen, sementara sektor manufaktur meningkat hingga diatas 12,99 persen dan sektor keuangan, persewaan & jasa-jasa diatas 21,70 persen. Pergeseran ini diharapkan diikuti pula oleh pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja, dimana sektor pertanian diharapkan menampung dibawah 40 persen dan dua gabungan sektor lainnya diatas 60 persen. Nilai PDRB ADHB pada akhir tahap ini diproyeksi diatas Rp. 7.549.606.309.000 dengan pertumbuhan rata-rata 13,49 persen, nilai PDRB perkapita diatas Rp.7.932.340 dengan rata-rata pertumbuhan 2,03 persen dan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 4,66</p>	<p>peradaban kota ditengah lingkungan pertanian pada ibukota-ibukota kecamatan dimana ibukota kabupaten merupakan sentrum dari peradaban tersebut. Hal ini didukung dengan program-program yang mendorong kemajuan masyarakat dalam bentuk olahraga dan kepemudaan, apresiasi seni-budaya, apresiasi pengetahuan/intelektualitas. Program pembangunan dalam pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat mencapai titik maksimal. Program peningkatan kualitas SDM pemerintah diarahkan pada terwujudnya pelayan masyarakat yang memadukan teknokratisme dengan humanisme. Program penguatan kelembagaan pemerintah diarahkan pada terposisikannya birokrasi dari Kabupaten hingga desa dan kelurahan sebagai teladan manifestasi akuntabilitas dan transparansi serta membangun kebersamaan dengan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	pengusaha kebutuhan pokok.	<p>persen. Angka kemiskinan diharapkan dipertahankan dibawah 5 persen dan angka pengangguran dibawah 6 persen.</p> <p>Pelayanan umum pada periode ini ditargetkan semakin prima membenahi administrasi kependudukan ditandai rasio penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk semakin tinggi. Selain itu pendidikan gratis diharapkan semakin efektif meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah orang miskin, begitu pula layanan kesehatan gratis diharapkan efektif menjangkau perawatan orang miskin. Terkait dengan daya saing daerah, pelayanan investasi diharapkan terakselerasi khususnya dengan pemanfaatan potensi pertambangan.</p> <p>Pencapaian dalam kebersamaan antar unsur tatanan pada periode ini diharapkan telah mewujudkan modal sosial yang kuat bagi terwujudnya Kabupaten Tapin yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan. Modal sosial tersebut ditandai oleh tingginya saling-percaya, kerjasama timbal-balik</p>	<p>dunia usaha dalam mengusung kemajuan agropolitan bagi kemajuan Kabupaten Tapin. Program pembangunan dalam daya saing daerah diarahkan pada terciptanya kualitas lingkungan hidup yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap berbagai guncangan ekologis khususnya dampak pemanasan global. Keterpeliharaan ruang terbuka hijau serta keseimbangan proporsi kawasan budidaya dengan kawasan lindung, ditata melalui implementasi program yang tetap konsisten dan patuh pada arahan RTRW. Dalam hal sarana dan prasarana transportasi darat, pelabuhan, perhubungan, komunikasi-informasi serta kelistrikan dan energi, program-program pada tahapan ini lebih bersifat pemeliharaan. Program yang terkait dengan landasan kebersamaan difokuskan pada signifikansi upaya revitalisasi, reaktualisasi dan manifestasi</p>
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan	<p>Peningkatan Perekonomian Daerah yang Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan:</p> <p>a. Pengembangan struktur perekonomian diarahkan untuk berlangsungnya transformasi struktur perekonomian sehingga menjelang tahun 2025 kontribusi sektor primer (pertanian secara umum) terus berkurang dan semakin berimbang dengan sektor sekunder (industri pengolahan hasil produk primer) dan tersier (jasa perdagangan dan keuangan serta informasi dan komunikasi) baik dalam nilai PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja; melalui perbaikan pada kegiatan agronomis kearah peningkatan produksi yang ramah lingkungan serta akselerasi pengembangan rantai nilai produk primer dalam kerangka agribisnis, agroindustri secara terpadu dan bersimbiosis dengan pengembangan sektor industri dan sektor jasa dengan berbasis pada interkoneksi desa-desa dengan ibu kota kecamatan.</p> <p>b. Pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan diarahkan pada meningkatnya produksi dan produktivitas dengan rantai nilai yang menekankan kualitas dari segi ekologis/organik, rasa dan aroma, nilai</p>		

4



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>tambah pengolahan hasil, serta efektivitas dan efisiensi usahatani dengan didukung oleh kemampuan teknis-agronomis dan kekuatan kelembagaan pada petani guna tercapainya pendapatan rumah tangga petani yang tinggi, perdagangan komoditas yang memantapkan sistem agrisbisnis dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; melalui (1) optimalisasi penggunaan lahan, penggunaan bibit bermutu yang adaptif terhadap perubahan iklim, inovasi pemupukan dan pengendalian hama kearah praktek organik, perbaikan jaringan irigasi usahatani dan jaringan irigasi desa, pompanisasi dan pembangunan embung, peningkatan kualitas pengolahan hasil dan pengemasan, pengembangan jaringan pemasaran, serta pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani, (2) penjaminan ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi pangan, perlindungan keamanan pangan dan fasilitasi kemandirian pangan tingkat desa/kelurahan, (3) pemberdayaan SDM dan kelembagaan penyuluhan; dalam kerangka untuk berkembangnya sistem agribisnis dan agroindustri yang efektif-efisien serta mendukung simbiosis desa-desa dengan ibukota kecamatan dalam suatu sistem konektifitas.</p> <p>c. Pembangunan peternakan diarahkan pada (1) meningkatnya populasi ternak besar yang perkembangannya bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan dalam</p>	<p>dan kepatuhan kepada norma diantara kelompok, golongan dan lapisan dalam masyarakat, dunia pemerintah dan dunia usaha disertai dengan sinergitas diantara ketiga pihak secara transparan, berakuntabilitas dan saling memberdayakan. Berbagai pencapaian tersebut diharapkan tetap bernafaskan keagamaan. Pada periode ini pencapaian dalam keterpenuhan sarana peribadahan, pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah, manifestasi ajaran agama sebagai etos kerja, serta manifestasi ajaran agama dalam perilaku akhlak mulia, secara kualitatif diharapkan semakin meningkat dibanding periode RPJM Daerah sebelumnya.</p>	<p>kearifan lokal, tata nilai dan norma serta adat-istiadat setempat dalam menjadikan potensi pariwisata sekaligus bagian dari upaya merespons secara kreatif unsur budaya yang datang dari luar akibat keterbukaan informasi dan komunikasi. Bersamaan dengan itu interkoneksitas internal antar unsur tatanan Kabupaten Tapin dan interkoneksitas eksternalnya pada level provinsi dan nasional diupayakan semakin intensif dan meluas guna menunjang keberadaan dari jalinan titik-titik agropolitan. Program terkait dengan keagamaan difokuskan pada pemahaman dan pengamalan agama yang semakin terpatrikan dalam etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum. Manifestasinya adalah berkembangnya kualitas akhlak mulia setiap unsur tatanan Kabupaten Tapin. Pencapaian IPM pada periode 2020-2025 diproyeksikan sekitar 79 dengan indikator pendidikan tercapainya</p>